



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

TANIA ANDELVIA FLORENTINA
11675201449

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TANIA ANDEL VIA FLORENTINA
NIM : 11675201449
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



DR. Mahmuzar, M.Hum

1976042620070111016

MENGETAHUI

DEKAN
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TANIA ANDEL VIA FLORENTINA
 NIM : 11675201449
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
 TANGGAL UJIAN : SENIN, 10 AGUSTUS 2020

Disetujui Oleh

Ketua Penguji

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si

19640508 199303 2 002

MENGETAHUI

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP

NIP. 19810505 200640 2 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh:
Tania Andelvia Florentina

Tujuan penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui penyelenggaraan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelenggaraan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengamatan/observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut peneliti analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya peneliti menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dilakukan selama ini jika dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belumlah terlaksana secara efektif oleh beberapa faktor yaitu a. Minimnya masyarakat yang Mendaftar. b. Kurangnya Sosialisasi. c. Koordinasi yang Belum Optimal.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Alhamdulillah rabbi alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam terucap buat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa cahaya kebenaran sampai sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan penulis, untuk itu penulis meminta ampun kepada Allah SWT, dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, M.Ag selaku rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administarasi Negara.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberi semangat, masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan seluruh instansi kelembagaan ataupun organisasi yang terlibat dalam penelitian ini.

Ayahanda Uderso Agustino dan Ibunda Delvita Yulianti, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungan sehingga ananda bisa berada ketahap ini.

10. Bapak Noviardi dan Ibu Tentri Wati juga Bapak Yon Hendri dan Ibu Sofia Delila yang telah menyediakan tempat tinggal selama ananda berkuliah.

11. Ibu Iche Setiawati S.E yang telah berkontribusi dalam membantu ananda sehingga dapat mempermudah penelitian ini.

12. Sahabat seperjuangan Mela Wirga Astika, Melati, Yunita Asma, Ranti ayu, Ratna Dewi, Monalisa, Muhammad Syukri, serta teman-teman sekelas ANA B yang sudah menemani selama beberapa tahun belakangan ini.

13. Serta Tissyy Kifitri, Citra Amelya, Silvia Anggaini, Rolly Asmi, Putri Andam Dewi, Senja Rolantika dan Widya Sari yang telah memberi ananda semangat agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini

Pekanbaru, ____ Agustus 2020
Penulis

Tania Andelvia Florentina



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| 2.1 Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.2 Konsep Bantuan Hukum | 15 |
| 2.3 Konsep Masyarakat Tidak Mampu | 17 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.5 Pandangan Islam Terhadap Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu..... | 21 |
| 2.6 Definisi Konsep..... | 23 |
| 2.7 Konsep Operasional | 24 |
| 2.8 Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 27 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| 3.3 Sumber Data..... | 27 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.5 Informan Penelitian..... | 30 |
| 3.6 Analisis Data | 31 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 32 |
| 4.1 Letak dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru | 32 |
| 4.2 Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 34 |
| 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 37 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 5.1 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu | 44 |
| 5.2 Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 77 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 82 |
| 6.1 Kesimpulan | 82 |
| 6.2 Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
| LAMPIRAN..... | 89 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Data Masyarakat yang Berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 7 |
| Tabel 1.1 | Data Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 8 |
| Tabel 2.1 | Peneliti Terdahulu | 19 |
| Tabel 2.2 | Konsep Operasional | 24 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian | 30 |
| Tabel 4.1 | Nama Ibukota dan Luas Wilayah Daerah Tingkat II | 33 |

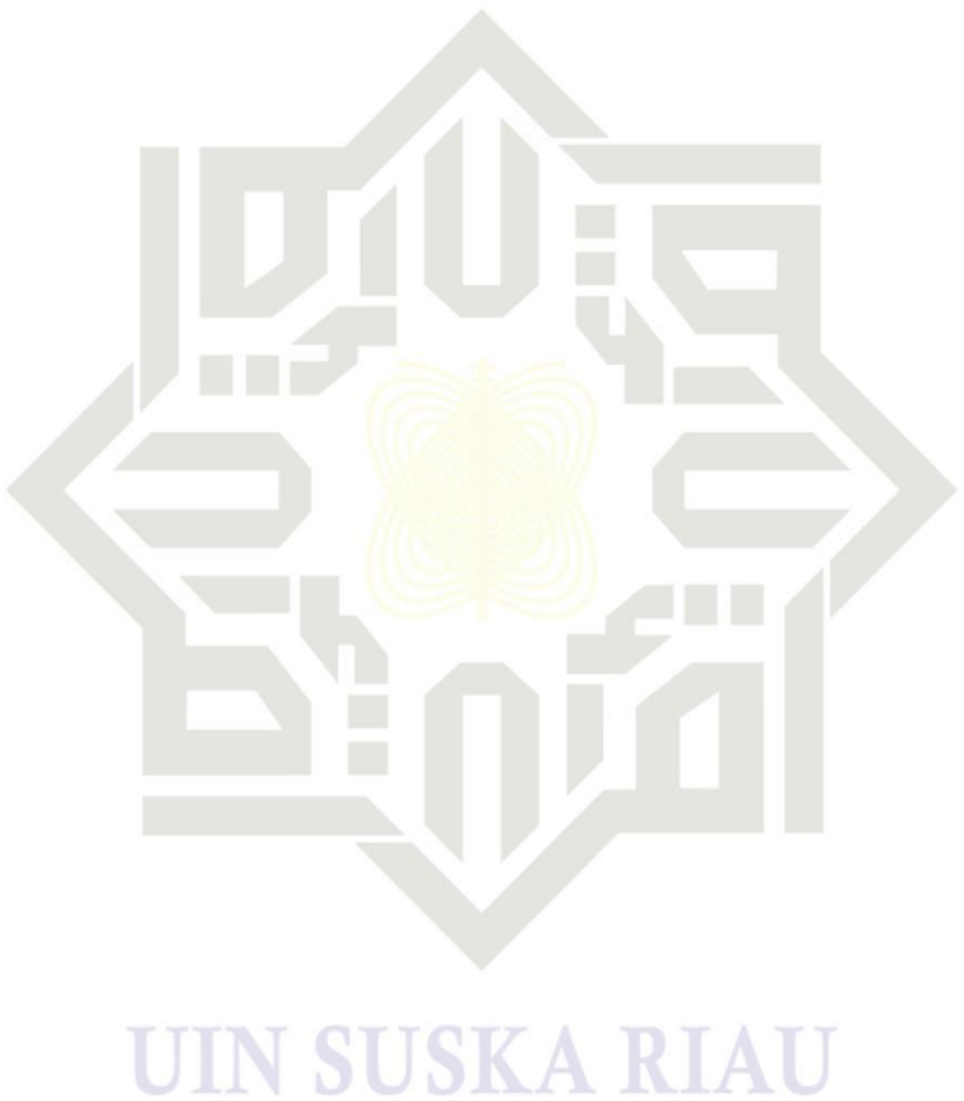


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran..... | 26 |
|------------|-------------------------|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum, sehingga segala sesuatu persoalan atau permasalahan harus diproses dan disesuaikan berdasarkan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat, menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang – Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah tentunya akan kesulitan dalam memperoleh pengacara, karena ketika seseorang ingin berperkara dipengadilan maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga lahirlah kebijakan di beberapa lembaga pengadilan untuk menyediakan Posbakum (pos bantuan hukum) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi, salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Posbakum merupakan bagian dari organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAM RI. Sebagai bentuk koordinasi Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara melalui surat perintahnya, Maka setiap pengadilan diharuskan untuk menyediakan fasilitas ruangan sebagai Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan merekrut Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat yang terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM. Jadi, ketika LBH atau Advokat sudah memenuhi kriteria dan sepakat maka terbentuk kerjasama yang disebut dengan kontrak kerja. Setelah terjalannya kerjasama maka LBH/Advokat dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan bekerjasama berdampingan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure* (SOP) masing – masing.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pos Bantuan Hukum mulai berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru sejak tahun 2015. Advokat yang menjadi ahli dilayanan ini sudah memenuhi kriteria yang ada dan sudah melalui tahapan administrasi terlebih dahulu, dan sudah diberikan SKnya yang tentu sudah sangat ahli dalam bidang tersebut. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh para calon advokat pos bantuan hukum adalah :

- a. KTP
- b. Kartu Advokat
- c. Berita Acara Sumpah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. NPWP

e. Surat permohonan

Apabila persyaratan sudah dilengkapi berkas diantar langsung ke instansi terkait untuk tingkat lanjutan.

Selanjutnya adapun landasan hukum yang mengatur tentang bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kemudian lebih jelas lagi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Seperti yang kita ketahui di Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya yang menjadi tergugat adalah kebanyakan dari pejabat Negara atau pegawai pemerintah yang tentunya memiliki ekonomi menengah keatas atau tergolong mampu, tetapi dibalik itu ternyata ada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang menjadi penggugat atas kasus sengketa tanah dan yang menjadi penggugat adalah PNS. Tentunya sang penggugat yang tidak mampu dalam memperoleh pengacara ini dapat dibantu oleh Posbakum sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Berikutnya penulis juga mendapatkan fenomena serupa didalam beberapa jurnal diantaranya hasil penelitian yang *pertama* dari Diding Rahmat (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan” menyatakan bahwa Proses pelaksanaan



program bantuan hukum di kabupaten kuningan berjalan dengan peraturan Perda bansos sehingga kurang mengatur lebih khusus tentang bantuan hukum juga pemberian perkara bantuan hukum cenderung terpusat di pengadilan yang harusnya program tersebut dilaksanakan harus dimulai ditingkat penyidikan kepolisian. Selanjutnya *kedua* penelitian oleh Tata Wijayanta (2016) yang berjudul “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta” menjelaskan Ukuran yang digunakan dalam menentukan ukuran tidak mampu bagi pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Posbakum adalah kriteria tidak mampu atau miskin sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengamanan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) dan dokumen penunjang lainnya dan juga menjelaskan bahwa dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka posbakum yang keberadaannya belum banyak dikenal oleh karena itu disarankan perlunya sosialisasi Posbakum pada masyarakat. *Ketiga* penelitian oleh Ade Irawan Taufik (2013) yang berjudul “Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma” penelitian ini sedikit berbeda dengan dua penelitian di atas dimana penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan yang dilatarbelakangi oleh sikap kerdmawanan (*charity*) dan sebagai suatu gerakan individual menjadikan rendahnya kualitas jasa hukum yang diberikan juga selain itu masalah pendanaan; persebaran jumlah advokat yang tidak merata diseluruh pelosok menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau..

penghambat dalam jaminan akses masyarakat dalam mencari keadilan sehingga dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum 2011, peran Negara dalam mewujudkan model bantuan hukum kesejahteraan akan relatif mudah tercapai.

Keempat penelitian oleh Thalys Noor Cahyadi (2013) yang berjudul “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012) yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan posbakum di Pengadilan Agama Sleman secara faktual dapat dikatakan berjalan efektif, Mayoritas tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2010 terutama dalam Lampiran b, dapat terpenuhi dengan baik. Hal yang menjadi kelemahan Posbakum Pengadilan Agama Sleman adalah adanya penafsiran yang terlalu luas dalam memaknai ‘ketidakmampuan’ masyarakat pencari keadilan, dimana pihak Pengadilan Agama sleman lebih memaknai ‘tidak mampu’ sebagai tidak mampu ‘memahami’ prosedur proses peradilan ataupun tidak mampu ‘membuat’ berkas-berkas pengajuan perkara. Meskipun demikian mengacu indikator efektifitas baik dari segi substansi kebijakan program, fasilitas program, pelaksanaan program, dan kesadaran masyarakat pemanfaatan program, penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan efektif. *Terakhir kelima* penelitian oleh Yusuf Saefudin (2015) yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” menyimpulkan bahwa Implementasi bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi dengan hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya pengawasan yang belum maksimal, masih banyak orang miskin yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tahu adanya program bantuan hukum, proses reimbursement yang sering terlambat dan ego sektoral lembaga hukum yang terkait masih tinggi serta administrasi reimbursement yang terlalu sulit dipahami belum efektif dan efisien.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa efektifitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum sangat diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat tidak mampu juga penting agar banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan bahwa ternyata ada bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu dipengadilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Adapun persyaratan agar dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dipengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tinjauan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini fungsi dari pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan beserta petugas posbakum yang ada sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana didalam pelaksanaannya diharapkan adanya sikap profesional dan akuntabilitas dalam menegakkan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui masyarakat yang mengajukan bantuan hukum ke posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Masyarakat yang Mengajukan Bantuan Hukum di Posbakum Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

| No | Bulan | Tahun | | | |
|----|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Januari | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Februari | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Maret | - | - | 1 | 1 |
| 4 | April | - | - | - | 1 |
| 5 | Mei | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Juni | - | - | - | 1 |
| 7 | Juli | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Agustus | - | - | 1 | 1 |
| 9 | September | 1 | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | 1 | - | - |
| 11 | November | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Desember | - | 1 | - | 1 |
| | Total | 4 | 4 | 6 | 7 |

Sumber: Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas jelas dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang mengajukan bantuan hukum semakin meningkat tetapi berbeda dengan masyarakat yang mendapat bantuan hukum seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

| Tahun | Jumlah | Jenis kasus |
|-------|--------|----------------|
| 2015 | 1 | Sengketa tanah |
| 2016 | - | |
| 2017 | - | |
| 2018 | 1 | Sengketa tanah |

Sumber: Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (2019)

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini hanya 2 orang/kasus yang mendapat bantuan hukum. Permasalahan yang biasanya ditemui dalam perkara ini yaitu adanya anggaran tapi tidak ada gugatan sedangkan adanya gugatan tetapi tidak ada anggaran karena hanya disediakan untuk satu perkara per tahun serta masyarakat yang banyak mengajukan bantuan hukum tidak dari masyarakat miskin seperti yang dikategorikan, serta kurangnya sosialisasi pada masyarakat bahwa tidak hanya di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang menyediakan Pos bantuan hukum tapi juga pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu hanya beberapa perkara perdata tanah yang mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti sebagaimana yang telah dibahas diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
2. Apa faktor penghambat penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam wacana keilmuan tentang hukum acara perdata khususnya posbakum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perkembangan hukum di Indonesia dan memberikan pengetahuan tentang Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian menjadi pertimbangan dan pedoman terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini mengemukakan tentang berbagai pendapat teori-teori yang erat kaitannya dengan kebijakan publik, teori efektivitas, konsep bantuan hukum, konsep masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Jhonson dalam Solichin, (2014 : 9), dewasa ini istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam kontek tindakan–tindakan atau kegiatan–kegiatan yang dilakukan para aktor dan institusi – institusi pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya. Dalam konteks ini kemudian sering berkonotasi serta membawa konsekuensi politisi. Dari sinilah kebijakan diberi makna sebagai tindakan politik (*political action*).

Defenisi lain mengenai kebijakanpun dikemukakan oleh Lasswell dalam Parson, (2016 : 17) pada umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil, baik dalam kehidupan yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Soeharto (2012 : 7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara – cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Maka kebijakan sebagaimana yang dikemukakan tadi akan semakin jelas bila kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich dalam Solichin (2014:9) yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan–hambatan tertentu seraya mencari peluang–peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Anderson dalam Arifik (2014 : 21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Jika dilihat dari berbagai disiplin, menurut Dye dalam Hakim (2016 :114), kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gun dalam Soeharto (2013 : 4), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dalam arti bahwa makna kebijakan bukan saja hanya sektor pemerintah saja, melainkan organisasi-organisasi non-pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Richard Rose dalam Agustino (2014 :7) juga berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan” dalam hal ini Rose memberikan catatan yang berguna bagi kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Kemudian apabila kita merujuk pada Eulau dan Peters dalam Lukman Hakim (2010 : 114), mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah “ketetapan yang berlaku” yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berujung baik dari yang

membuatnya maupun yang menaatinya. Sedangkan menurut Peter mengartikan kebijakan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk Negara itu.

Makna kebijakan publik yang dikemukakan diatas akan semakin jelas apabila kita pertegas lagi dengan pendapat Anderson dalam Agustino (2014 : 7), bahwa

“Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan, dimana konsep ini menitik-beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan”.

Dari pendapat-pendapat diatas, sebenarnya kebijakan dikelompokkan dari sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otoritas formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai “hasil” (outcome)
9. Sebagai teori model
10. Sebagai sebuah proses.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sepuluh pengelompokkan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Dimana hal tersebut apabila ditinjau dari dimensi histori dan memberikan wawasan kepada kita bahwa kebijakan memiliki fokus yang berbeda-beda (dalam Parsons, 2006 : 15)

Dalam kaitannya dengan definisi – definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan public. *Pertama* , pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada sebuah tindakan yang berubah/acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya terdiri atas tindakan–tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan–keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, sedangkan secara negatif, kebijakan publik melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengenakan apapun padahal keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir *kelima*, kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Konsep Bantuan Hukum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu di Pengadilan Tata Usaha Negara disediakan tempat pemberian layanan hukum yang dikenal dengan istilah Posbakum (pos bantuan hukum) yang merupakan tempat pemberian layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Berikut ini adalah beberapa tugas dan fungsi Mahkamah agung dikutip dan dijabarkan berdasarkan pernyataan yang di publikasikan pada website Mahkamah Agung Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi peradilan

Fungsi peradilan pada Mahkamah Agung sangat berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dan juga tugas utama dari seluruh sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung merupakan sistem pengadilan yang tertinggi, dimana mahkamah agung juga didaulat untuk melakukan fungsi peradilan, meskipun hanya diperkenankan melakukan proses peradilan pada tingkat kasasi.

2. Fungsi pengawasan merupakan sebuah fungsi dimana Mahkamah Agung memiliki peran dan juga fungsi sebagai pengawas dan melakukan proses supervisi terhadap segala bentuk peradilan yang berjalan di Indonesia, baik itu dari sisi putusan hakim, berbagai macam kasus dan juga segala bentuk proses peradilan di Indonesia.

3. Fungsi mengatur

Fungsi berikutnya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi mengatur. Tugas dari Hakim Agung dalam fungsi mengatur ini adalah:

- a) Membuat peraturan acara sendiri apabila hal tersebut dianggap perlu
- b) Mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan peradilan
- c) Menambahhkan aturan tambahan apabila belum terdapat pada undang-undang yang berlaku di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang muncul pada saat proses peradilan sedang berlangsung.

4. Fungsi Nasehat

Fungsi memberikan nasihat merupakan fungsi sekaligus kewenangan dari mahkamah agung dalam memberikan masukan, pertimbangan, serta bimbingan, baik kepada seluruh kegiatan dan juga proses peradilan di Indonesia, dan juga bagi kepala Negara dalam menjalankan wilayah eksekutifnya.

5. Fungsi administratif

Fungsi administratif pada mahkamah agung ini dilakukan untuk memberikan segala bentuk pertimbangan dan juga hal-hal yang sifatnya administratif, seperti pemberian sanksi, menjadi pengawas, dan juga membuat regulasi-regulasi serta kode etik yang harus dipegang teguh dan peraturan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung.

2.3 Konsep Masyarakat Tidak Mampu

Menurut kamusbesar bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga kedalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan menggunakan faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat dilingkungkannya. Dalam hal ini kelompok yang dikategorikan miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya, KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu salah satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan, “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum diatur dalam pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, Sistem Hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjaminadanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu layanan hukum merupakan hak asasi manusia (Hakki Fajriando, dkk, 2016 : 57).

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh beberapa orang peneliti lainnya, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|--|---|
| 1. | Riadul Apkar (2016) | Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pos | Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum optimal karena adanya penyimpangan-penyimpangan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|-----------------|--|--|
| 2. | Dessy Rahmawati | Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Tahun 2016 Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di pengadilan Negeri Pekanbaru | dalam Prakteknya. Salah satunya adalah layanan hukum dimanfaatkan oleh masyarakat yang dikategorikan masyarakat mampu secara ekonomi. sehingga orang-orang menganggap enteng untuk berperkara di Pengadilan Agama hanya dengan melampirkan SKTM dan secara tidak langsung merugikan Negara karena biaya Posbakum di tanggung oleh Negara. Hasil penelitiannya adalah bahwa Implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin. |

Berbeda dengan hasil penelitian tabel diatas, penelitian ini lebih terfokus kepada bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara prodeo/perdata. Dalam penelitian ini juga lebih menjelaskan secara terperinci bagaimana kriteria masyarakat miskin seperti apa yang layak diberi bantuan hukum, serta menganalisis peranan posbakum dalam menangani perkara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pandangan Islam terhadap Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pelayanan hukum yang diberikan oleh posbakum adalah suatu perbuatan yang mulia. Sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh, melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. AL-Maidah [5]:32)*

Selain memiliki tujuan yang mulia, layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pos bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara juga sebagai pengalaman sikap manusia yang dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. AL-Maidah [5] :2)

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa hukum islam juga membolehkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dimana layanan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban orang yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyediakan tempat untuk menyelesaikan perkara yang dibutuhkan dengan pemberian jasa advis/konsultasi serta pembuatan surat gugatan yang disebut dengan Posbakum (Pos Bantuan hukum) yang disediakan untuk melayani masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Konsep

Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
2. Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.
3. Posbakum pengadilan merupakan suatu tempat pemberian layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.
4. Masyarakat kurang mampu atau miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidak-mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|---|---|
| Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 1. Memberikan layanan Hukum secara gratis | a. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada pencari keadilan b. Memaksimalkan pemberian layanan hukum melalui Penggunaan sumber anggaran yang ada. |
| | 2. Meningkatkan akses Keadilan | a. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, dan Jujur b. Informasi yang terkait dengan hukum dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami c. Memberikan akses kepada masyarakat melalui media sosial d. Melakukan sosialisasi eksternal (masyarakatPenerima bantuan hukum) e. Pelaksanaan pemberian layanan hukum yang tepat sasaran |
| | 3. Memberikan Kesempatan mengakses | a. Masyarakat melakukan konsultasi b. Masyarakat |

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

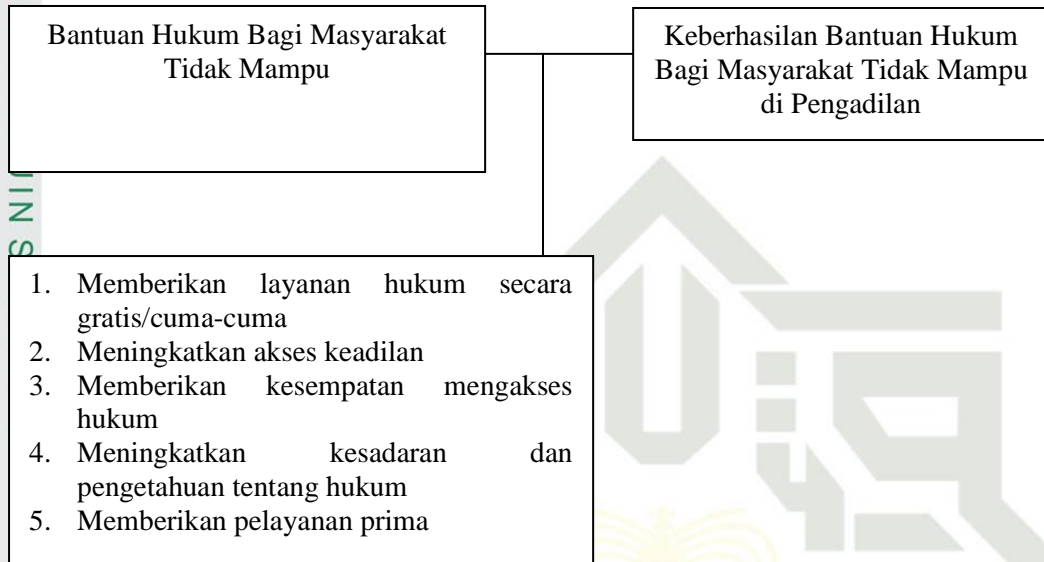
| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|----------|---|---|
| | Hukum | memperoleh pendamping hukum (advis hukum) |
| | | c. Pembuatan dokumen hukum dalam menjalani proses hukum di Pengadilan |
| | 4. Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan tentang Hukum | a. Masyarakat memiliki Kesadaran tentang hukum |
| | | b. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang Hukum |
| | | c. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum |
| | | d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengacara |
| | 5. Memberikan Pelayanan prima | a. Sikap pelaksana dalam melayani masyarakat |
| | | b. Tidak membedakan Pelayanan |
| | | c. Pelaksanaan pelayanan yang mudah |

Sumber : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai mana tertera pada gambar dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan melalui studi literatur mengenai sasaran, arah kebijakan, program/kegiatan, dan capaian program bantuan hukum. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data, untuk menyusun proposal ini penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terletak di Jl. HR Sebrantas Panam Pekanbaru. Waktu penelitian tanggal 29 Oktober 2019 jam 09.00 – 11.00 WIB.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara (interview) dan observasi (pengamatan) secara langsung dengan advokat pos bantuan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta yang bersangkutan seperti hakim dan panmud hukum. Adapun data yang diperoleh adalah

- a. Kebijakan posbakum dalam menangani perkara prodeo di PTUN Pekanbaru
- b. Data jumlah masyarakat yang mengajukan layanan hukum serta mendapatkan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia baik itu dari buku-buku kepustakaan atau jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data yang diperoleh meliputi:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan;
3. Letak Geografis, Monografis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- 5.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban tersebut (Muelueng, 2002:135) dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan Tanya jawab langsung kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sangat mengetahui tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru, dimana wawancaranya peneliti lakukan dengan mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan.

2. Observasi/pengamatan

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap (Ari Kuntoro, 2002:133). Dimana dalam penelitian ini peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung pengimplementasian pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Sehingga peneliti turun langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relavan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moelong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penentuan Informan Penelitian yang dianggap sebagai *key informan* peneliti lakukan dengan cara *Purposive Sampling*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2010:85) bahwa, teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambil sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-orang yang dianggap paling tahu dengan permasalahan yang akan peneliti teliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan, Hakim Pengadilan, Koordinator Posbakumdan masyarakat yang mengajukan layanan hukum ke Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|---------------|---|-----------|
| 1 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 1 |
| 2 | Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 1 |
| 3 | Koordinator Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru | 1 |
| 4 | Masyarakat yang mengajukan bantuan hukum | 8 |
| Jumlah | | 11 |

Sumber: Data Olahan 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:95) deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Dalam penelitian deskriptif peneliti melakukan analisa dari beberapa penjelasan pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori memilih mana yang penting data yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5–11 meter. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur penghubung lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman rakyat ke kota serta beberapa daerah lain di provinsi Riau. Letak geografis kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari daerah-daerah lain di sekitar kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ – $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Sedangkan kelembapan maksimum antara 96%-100% dan Kelembapan Minimum antara 46%-62%.

Table 4.1
Nama–Nama Ibukota dan Luas Wilayah Daerah Tingkat II

| Daerah Tingkat II | Ibukota | Luas wilayah (Km) | Persentase luas |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Kuantan Singingi | Taluk Kuantan | 7.656,03 | 8,06 |
| Indragiri Hulu | Rengat | 8.198,26 | 8,63 |
| Indragiri Hilir | Tembilahan | 11.605,97 | 12,22 |
| Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 11.987,90 | 12,63 |
| Siak | Siak Sri Indrapura | 8.423,08 | 8,87 |
| Kampar | Bangkinang | 9.756,74 | 10,28 |
| Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | 6.163,68 | 6,49 |
| Bengkalis | Bengkalis | 11.614,78 | 12,23 |
| Rokan Hilir | Bagan Siapi Api | 8.881,59 | 9,35 |
| Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 3.010,13 | 3,17 |
| Karimun | Tanjung balai karimun | 840,59 | 0,89 |
| Natuna | Ranai | 2.723,79 | 2,87 |
| Pekanbaru | Pekanbaru | 821,15 | 0,87 |
| Batam | Batam | 1.525,18 | 1,62 |
| Dumai | Dumai | 1.727,38 | 1,82 |
| Jumlah | | 97.942,25 | 100,00 |

Sumber : <http://www.pekanbaru.go.id/> (Januari 2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah kota pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah kota pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya sungai siak ini mempunyai beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.

4.2 Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 (bersama-sama dengan PTUN Samarinda dan PTUN Bandar Lampung), mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998.

Terbentuknya PTUN Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) di Indonesia, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa meskipun Undang-Undang Peratun tersebut telah diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, namun peradilannya baru dibentuk dan beroperasi setelah lima tahun kemudian. Hal mana disebutkan di dalam Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 145 beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

“Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan lingkungan peradilan yang baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah mengenai prasarana dan sarana baik materil maupun personil. Oleh karena itu pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengakomodasikan hal tersebut maka penerapan Undang-Undang ini secara bertahap dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada awal beroperasinya PERATUN, waktu itu baru terbentuk 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.52 Tahun 1990 yakni : PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Ujung Pandang. Sedangkan untuk tingkat banding baru terbentuk 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) berdasarkan UU No.10 Tahun 1990, yaitu PT-TUN Jakarta, PT-TUN Medan dan PT-TUN Ujung Pandang. Dalam perkembangannya hingga saat ini (tahun 2005), telah terbentuk dan beroperasi sebanyak 4 (empat) PT-TUN dan 26 (dua puluh enam) PTUN di seluruh Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gedung PTUN Pekanbaru berlokasi di kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau, tepatnya di Jalan HR.Subrantas Km.9, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Gedung ini diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak OETOYO OESMAN, SH pada tgl.29 Oktober 1998 bersamaan dengan mulai beroperasinya PTUN Pekanbaru.

Gedung ini menempati lahan (dengan status Hak Pakai) seluas 3.000 m², dengan satu buah bangunan yang terdiri dari bangunan induk di bagian depan serta bangunan tambahan di bagian belakang, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan HR Subrantas ;
- b. Sebelah Timur : Ruko ;
- c. Sebelah Selatan : Perumahan ;
- d. Sebelah Barat : Jalan Melur.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut :

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah :

VISI : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mandiri, berwibawa dalam Penegakan Hukum dan Keadilan, serta terciptanya Supremasi Hukum. Hal ini tentunya harus didukung oleh seluruh personil Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang secara konsekuen melaksanakan Tugas dan Wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MSI

: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah untuk mewujudkan Pengadilan dalam menerima, memelihara, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berada dibawah lembaga Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN Pekanbaru), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara PT.TUN) yang berwenang.

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru (PTUN Pekanbaru), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (isticiabelen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Membina Calon Hakim dan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknik, yustisial maupun administrasi umum juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya, serta menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang kehakiman.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut:

4.3.1 Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

adalah membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan, bidang tugas yudisial untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 Wakil Ketua

adalah membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang teknis peradilan dan administrasi peradilan mengenai yudisial untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.3 Hakim

Menyelenggarakan tugas pokok pengadilan yang secara teknis menerima dan memutus perkara khususnya dibidang sengketa Tata Usaha Negara.

4.3.4 Panitera Pengadilan Tingkat Pertama

adalah menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan yang berlaku.

Kemudian Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua perkara yang diterima di kepaniteraan, meneliti dan melegalisir bukti-bukti serta membuat salinan putusan Pengadilan.

4.3.5 Sekretaris

adalah menyelenggarakan, melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan, meliputi bidang administrasi, kepegawaian, keuangan dan umum. Bahwa sekretaris melakukan pengawasan langsung terhadap administrasi, menyusun dan mempersiapkan Program Kerja dan Rencana Kerja untuk persiapan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA– KL) serta pengelola website.

4.3.6. Pejabat Struktural Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Wakil Panitera

adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya apabila Panitera berhalangan melaksanakan tugas panitera, membantu Panitera melaksanakan tugasnya dalam memimpin kepaniteraan Pengadilan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang kepaniteraan meliputi Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya, dan membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti dan turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan kegiatan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretaris.

adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan administratif kesemua unsur dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, membantumenyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk tiap Tahun Anggaran, membantumelaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA setiap Tahun Anggaran, melaksanakan tugas sebagai penanggung-jawab kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam setiap Tahun Anggaran, mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan, melaksanakan pengawasan terhadap bawahan dan turut serta merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya. Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, yang mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan akan memberikan keuntungan bagi lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan dengan dibentuknya Jabatan Struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

c. Panitera Pengganti

adalah mencatat dan menangani segala hal dalam persidangan sengketa TUN dengan mengikuti sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam bidang Tehnis administratif persidangan.

d. Panitera Muda Hukum

adalah melakukan urusan data perkara, statistik dan dokumentasi PTUN dan urusan lain yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Panitera Muda Perkara

adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkara TUN untuk menunjang kelancaran tugas PTUN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

adalah mengkoordinasikan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, karis/karsu pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya guna tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Kepala Sub Bagian Umum

adalah melakukan dan mengkoordinasikan surat-menyurat, pengurusan surat dan kearsipan, urusan perencanaan, pengadaan

dan pemeliharaan perlengkapan dan urusan rumah tangga PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Kepala Sub Bagian Keuangan

adalah melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dapat disimpulkan dalam uraian berikut ini .

Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dilihat dari pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun belumlah terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator dibawah ini.

- a. Dalam tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang pertama yaitu memberikan layanan hukum secara gratis/cuma-cuma belumlah terlaksana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, bahwasanya didalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah sangat bagus karena biaya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat, hanya saja jumlah masyarakat yang mendapat bantuan tersebut sangat sedikit dan berpengaruh pada anggaran pertahunnya.
- b. Dilihat dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang kedua yaitu meningkatkan akses keadilan kepada masyarakat pencari keadilan belumlah terlaksana secara optimal, masyarakat mengetahui informasi adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya ketika datang ke Pengadilan dan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana memberikan akses kepada masyarakat hanya melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, namun tidak memperluas informasi melalui media sosial yang ada. Kemudian para pelaksana hanya menunggu dari Mahkamah Agung nya itu sendiri dalam hal sosialisasi dan itupun hanya mengumpulkan perangkat desa di hotel dan cendrung perangkat-perangkat yang ada tidak menyampaikan informasi itu kembali kepada masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara di Pengadilan.

- c. Ditinjau dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang ketiga yaitu memberikan kesempatan mengakses hukum kepada masyarakat pencari keadilan sudah berjalan dengan baik, mulai dari masyarakat melakukan konsultasi, memperoleh pendamping hukum dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan tersebut. Namun, masyarakat penerima layanan hukum sangat sedikit sekali di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- d. Dilihat dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum masih jauh dari yang diharapkan, karena rasa ingin tahu masyarakat tentang hukum sangat rendah dan selalu merasa dizolimi oleh pemerintah dalam prakteknya, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini disebabkan karena kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum ataupun pendidikan akan hukum bagi masyarakat. Akibatnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum atau pengacara semakin menurun dan masyarakat enggan untuk mengajukan layanan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

- e. Dalam tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang kelima yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari proses yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga tidak merepotkan masyarakat pencari keadilan.

2. Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Berdasarkan pengamatan peneliti lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pos bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan gratis sehingga mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang mendaftar di Pos Bantuan Hukum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, peneliti memberikan rekomendasi sebagai saran bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru khususnya untuk Pos Bantuan Hukum, yakni :

1. Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai pelaksana pemberi layanan hukum bagi masyarakat perlu untuk melakukan sosialisasi lebih dari sekali kepada masyarakat, baik dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum atau edukasi mengenai hukum bagi suatu masyarakat tidak mampu dan ketika perangkat-perangkat desa atau kecamatan yang diundang sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan sosialisasi kembali kepada lingkungan masyarakat setempatnya. Jangan sampai hanya berhenti ditingkat perangkat desa atau kecamatan saja, disamping itu pihak pelaksana layanan hukum perlu untuk memperluas informasi melalui media sosial juga. Dan di harapkan juga pihak Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang turun tangan langsung tanpa harus menunggu dari Mahkamah Agung nya itu sendiri.

2. Pihak pelaksana pemberi layanan hukum perlu untuk melakukan koordinasi secara optimal, hal ini perlu untuk menjalin koordinasi dengan perangkat-perangkat desa lainnya terutama tentang adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Dimana para perangkat yang ada seharusnya sudah memberi tahu kepada masyarakat pencari keadilan tersebut sebelum masyarakat datang terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Quran, 2010. *Syaam Al-Quran*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Public*. Bandung : Alfabeta
- Alkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- BPS, 2008. *Analisis dan perhiungan tingkat kemiskinan tahun 2008*. Jakarta: BPS
- Departemen Pendidikan Nasional. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Donnelly, I. Gibson. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur Proses*. Jakarta : Bina Rupa Aksara
- Kumorotomo, wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Nogi, Hessel. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset Yogyakarta.
- Nugroho, Rian. 2011, *Publik Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputerindo Kelompok Media
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy : Pengantar Teori dan Paktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Psolong, Harbani. 2013. *Teori Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, soekanto, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY
- Syafiie, K. Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tahrir, Arifin. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Ade Irawan Taufik (2013). Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Jurnal media Pembinaan Hukum Nasional Vol.2 No.1

Diding Rahmat (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1

Thalis Noor Cahyadi (2013) Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan agama Sleman Tahun 2011-2012). Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.2 No.1

Tata Wijayanta (2017). Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jurnal Fakultas Hukum UGM Vol.24 No.1

Yusuf Saefudin (2015). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Idea Hukum Vol.1 No.1

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

**Untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Panitera Muda
Hukum dan Petugas Piket Posbakum.**

a) Meringankan Biaya

1. Apakah ada biaya dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, jika ada berapa besar biayanya?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang biaya dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan ? dan apakah biaya yang sudah terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan ?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu pemberian bantuan hukum sudah menggunakan sumber anggaran yang ada setiap tahunnya secara maksimal? Dan berapakah jumlah anggaran untuk masyarakat yang tidak mampu tersebut pada tiap anggarannya?

b) Meningkatkan Akses Keadilan

1. Apakah Advokad yang bekerja sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah memberikan akses kepada masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi pemberian layanan hukum secara lengkap?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah informasi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu ?
3. Bagaimana Masyarakat mengetahui Informasi mengenai adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin di pengadilan? Seperti yang kita ketahui PTUN Pekanbaru biasanya yang berperkara dari golongan pejabat tetapi tetap menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin ?
4. Agar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dapat terlaksana dengan efektif, apakah dalam memberikan bantuan hukum tersebut posbakum pengadilan ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
5. Siapa yang melakukan sosialisasi tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin di pengadilan?
6. Kapan saja waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin tersebut? Dan dimana biasanya melakukan sosialisasi tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin?
7. menurut Bapak/Ibu apakah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut sudah tepat sasaran dalam pelaksanaannya? Dan apa dampaknya jika ada masyarakat yang mampu memperoleh bantuan hukum tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memberikan Kesempatan Mengakses Hukum

1. Apakah setiap masyarakat yang melakukan konsultasi tersebut nantinya mengurus persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum Bapak/Ibu? Mengapa demikian?
2. Apakah masyarakat yang memperoleh bantuan hukum tersebut semuanya memperoleh pendamping hukum nantinya dan didampingi sampai permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan tersebut terselesaikan secara hukum?
3. Bagaimana cara masyarakat tersebut memperoleh pendamping hukum Bapak/Ibu?
4. Apakah semua masyarakat yang mengajukan bantuan hukum ke posbakum PTUN Pekanbaru dibantu dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan Bapak/Ibu?

d) Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan tentang Hukum

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran tentang hukum? dan seharusnya bagaimana masyarakat bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum ?
2. Menurut Bapak/Ibu sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?
3. Menurut Bapak/Ibu sejauhmana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum/pengacara ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Memberikan Pelayanan Prima

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemberi layanan hukum kepada masyarakat dalam melayani masyarakat ?
2. Apakah pemberi layanan hukum mengutamakan kepentingan masyarakat pencari keadilan dari pada kepentingan pribadinya ?
3. Apakah pemberi layanan hukum tidak membedakan pemberian pelayanan antara masyarakat yang satu dengan lainnya ?
4. Apakah pelaksanaan pelayanan yang diberikan dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tidak dilaksanakan secara berbelit-belit ?

B. Untuk Masyarakat

a) Meringankan Biaya

1. Apakah ada biaya dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, jika ada berapa besar biayanya?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang biaya dalam pemberian bantuan bagi masyarakat tidak mampu tersebut? Apakah sudah sesuai dengan peraturan? dan apakah biaya yang ada sudah terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan?

b) Meningkatkan Akses Keadilan

1. Apakah Advokat yang bekerjasama dengan PTUN Pekanbaru sudah memberikan akses kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh informasi pemberian bantuan hukum secara lengkap?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah informasi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat pencari keadilan terutama bagi masyarakat tidak mampu tersebut?
3. Bagaimana Masyarakat mengetahui Informasi mengenai adanya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin di pengadilan? Seperti yang kita ketahui PTUN Pekanbaru biasanya yang berperkara dari golongan pejabat tetapi tetap menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ?
4. Agar pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dapat terlaksana dengan efektif, apakah dalam memberikan bantuan hukum tersebut posbakum pengadilan ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
5. Siapa yang melakukan sosialisasi tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan?
6. Kapan saja waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut? Dan dimana biasanya melakukan sosialisasi tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut sudah tepat sasaran dalam pelaksanaannya? Dan apa dampaknya jika ada masyarakat yang mampu memperoleh bantuan hukum tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memberikan Kesempatan mengakses Hukum

1. Apakah Masyarakat yang melakukan konsultasi tersebut nantinya mengurus persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum Bapak/Ibu ? mengapa demikian ?
2. Apakah masyarakat yang memperoleh bantuan hukum tersebut semuanya memperoleh pendamping hukum nantinya dan didampingi sampai permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan tersebut terselesaikan secara hukum Bapak/Ibu?
3. Bagaimana cara masyarakat tersebut memperoleh pendamping hukum Bapak/Ibu?
4. Apakah semua masyarakat yang mengajukan bantuan hukum ke Posbakum PTUN Pekanbaru dibantu dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ?

d) Meningkatkan Akses Keadilan

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran tentang hukum ? dan seharusnya bagaimana masyarakat bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum ?
2. Menurut Bapak/Ibu sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ?
3. Menurut Bapak/Ibu sejauhmana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum/pengacara ?

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Yusuf Ngongo S.H MH Selaku Hakim di PTUN Pekanbaru



Wawancara dengan ibu Mairi S.H Selaku Panitera Muda Hukum di PTUN Pekanbaru



Wawancara dengan Ibu Eka Mediely selaku Koordinator Posbakum di PTUN Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Wawancara bersama masyarakat yang mengajukan serta mendapatkan bantuan hukum



tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET/PRA RISET

Nomor W1.TUN6/734 /HM.00/6/2020

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29677 tanggal 15 Januari 2020 perihal seperti dalam pokok surat bersama ini menerangkan bahwa :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Tania Andelvia Florentina |
| Nim | : | 11675201449 |
| Program Studi | : | Administrasi Negara |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau |
| Judul Penelitian | : | Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru |

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan judul "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Pekanbaru, 16 Juni 2020

PLH KETUA,

YUSUF NGONGO, S.H., M.H
NIP. 19740118 200604 1 004